

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara dengan sumber daya hayati laut yang melimpah dan memiliki ekonomi sosial yang penting bagi pembangunan, yaitu berupa sumber pangan, lapangan kerja, dan penghasil devisa. Pembangunan Indonesia di sektor perikanan mempunyai arti yang sangat penting dan berperan strategis dalam mewujudkan sektor perikanan yang lebih maju, efisien dan tangguh. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat pesisir, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta memperluas pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri (Dahuri, 2000).

Kawasan pesisir dan sumber daya laut yang ada sebagian menghadapi persoalan lingkungan yang serius dan sebagian belum dikelola secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, untuk menangani persoalan pembangunan di kawasan pesisir diperlukan landasan pemikiran yang konseptual, komprehensif, dan visioner sehingga upaya-upaya membangun kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan dapat tercapai dengan baik. Persoalan kemiskinan yang menimpa masyarakat pesisir dan nelayan disebabkan oleh faktor-faktor yang kompleks dan tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan pembangunan yang parsial (Kusnadi, 2013).

Kemiskinan merupakan masalah pokok yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir dan sentra-sentra perikanan merupakan salah satu fokus dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan. Permasalahan masyarakat pesisir adalah kurangnya akses terhadap lembaga permodalan dan pasar. Kurangnya akses masyarakat pesisir terhadap lembaga permodalan menyebabkan kebanyakan masyarakat memilih mencari modal pada lembaga non formal seperti tengkulak dan rentenir yang justru semakin membawa masyarakat kedalam keadaan tidak berdaya. Keberadaan lembaga keuangan non formal ini di suatu sisi mampu memberikan solusi terhadap akses permodalan, karena lebih mudah untuk mengakses sejumlah uang untuk usahanya. Di sisi lain dapat menyebabkan sebagian masyarakat pesisir terjerat oleh hutang, akibat dari bunga yang sangat tinggi. Kondisi ini tentunya telah menjadi kendala yang menyebabkan ketidak berdayaan masyarakat pesisir.

Fungsi modal dalam menjalankan suatu usaha adalah untuk meningkatkan kapasitas produksi usaha. Masyarakat yang melakukan kegiatan usaha memerlukan modal untuk membeli alat-alat atau perlengkapan yang semakin modern. Bagi pelaku usaha perikanan membeli sarana peralatan yang modern dapat menimbulkan masalah karena sebagian tidak sanggup mendanai usahanya yang padat modal dengan dana sendiri. Suwardjono (2005) menyatakan pendapatan suatu usaha tergantung dari modal yang dimiliki, jika modal besar maka hasil produksi tinggi sehingga pendapatan yang diharapkan juga tinggi. Begitu pula sebaliknya, jika modal kecil maka hasil produksi rendah sehingga pendapatan yang diperoleh rendah.

Permasalahan modal yang dihadapi oleh para pelaku usaha perikanan kini telah mendapat perhatian khusus dari pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mempercepat tumbuh dan berkembangnya usaha bidang perikanan, mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran sekaligus menumbuhkan jiwa wirausaha bagi masyarakat pesisir di pedesaan. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan yang merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan kesepakatan global untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai tahun 2009 telah menginisiasi program pemberdayaan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri KP) yang terintegrasi dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat.. Mulai tahun 2012, PNPM Mandiri KP dilakukan melalui tiga komponen yaitu Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, dan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) serta Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT).

Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (PUMP P2HP) merupakan upaya kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan melalui fasilitasi bantuan pengembangan usaha bagi pengolah/pemasar Hasil Perikanan dalam suatu wadah Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar) sebagai pelaksana program PUMP P2HP. Program PUMP-P2HP memberikan setiap kelompok Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan kelompok dalam pengembangan

usahanya. Semenjak tahun 2015 program PUPM-P2HP telah berganti menjadi program Bantuan Pemerintah. Melalui program Bantuan Pemerintah, setiap kelompok diberikan bantuan berupa barang atau alat pengolahan dan pemasaran sesuai dengan apa yang di produksi oleh kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar) Hasil Perikanan.

Menurut Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Sarana Peralatan Pengolahan Tahun 2017, Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah. Tujuan diadakanya program bantuan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan, kuantitas produk perikanan, meningkatkan nilai tambah produk, meningkatkan kapasitas produksi usaha, serta dapat menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan. Sasaran bantuan pemerintah ini adalah kelompok atau badan hukum lain yang memenuhi kriteria persyaratan di seluruh Indonesia.

Desa Bondalem merupakan salah satu desa yang menerima bantuan pemerintah dari Dinas Kelautan dan Perikanan yang disalurkan pada Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar) Hasil Perikanan. Poklahsar yang ada di Desa Bondalem berjumlah 5 (lima), yaitu Poklahsar Mina Sari, Mekar Sari, Mina Artha Bakti Baruna, Sari Laut, dan Jaya Mandiri. Poklahsar yang mendapat tambahan modal melalui Bantuan Pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi dalam usaha produktifnya. Poklahsar yang ada di Desa Bondalem bergerak dalam bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Poklahsar membeli ikan secara langsung dari nelayan kemudian diolah menjadi ikan pindang dan kerupuk kulit ikan. Selain itu, ikan yang dibeli dari nelayan juga

dijual secara langsung tanpa pengolahan. Dalam kegiatan pemasaran, poklhasar memasarkan hasil usahanya ke daerah Kintamani, Karangasem dan Buleleng. Selama menjalankan usahanya Poklhasar telah mendapat bantuan dari pemerintah berupa *sliding freezer*, *freezer*, kompor untuk pemindangan, keranjang, *cool box* dan peralatan pengolahan yang sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan.

Program Bantuan Pemerintah dikatakan berhasil apabila program dapat menunjukkan efektivitas yang baik. Hal tersebut ditandai dengan *output* yang dihasilkan sesuai dengan apa yang diharapkan atau ditargetkan terutama dalam meningkatkan kapasitas produksi dan nilai tambah hasil perikanan. Menurut Halim dan Syam (2013:134) “efektivitas adalah ukuran keberhasilan tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif”. Efektivitas mengukur hasil akhir dari suatu pelayanan yang dikaitkan dengan outputnya. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin berperan kontribusi *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif program tersebut (Halim dan Syam, 2013). Dalam setiap program, efektivitas merupakan unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Efektivitas program dapat dinilai dengan menggunakan model evaluasi. Arikunto dan Cepi (2014) menyatakan bahwa tujuan umum dari evaluasi adalah untuk mengetahui seberapa efektif program yang di jalankan. Model evaluasi yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas suatu program adalah evaluasi model CIPP (*Context, Input, Process, dan Product*). Dan dengan menggunakan

rasio efektivitas yaitu dengan membandingkan antara target dengan realisasi dalam merealisasikan program Bantuan Pemerintah. Melalui empat komponen tersebut dapat mengukur sejauhmana efektivitas program agar berjalan efektif agar menghasilkan suatu *output* yang baik. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oka Wirawan (2015), dengan judul Efektivitas Program Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dalam Upaya Peningkatan Kesempatan Kerja dan Pendapatan Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Kerambitan dengan menggunakan rancangan evaluasi model CIPP (*Context, Input, Process, dan Product*). Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Suci Mulia dengan judul Efektivitas Program Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat dengan menggunakan evaluasi model CIPP (*Contexts, Input, Process, dan Product*). Serta penelitian yang dilakukan oleh Nurul Zumiatus Hanfiah dkk (2017) dengan judul Efektivitas Penyelenggaraan Program Pendidikan Kewirausahaan Melalui Pelatihan Pembuatan Kripik Jagung Manis (Keja Mas) dengan menggunakan evaluasi model CIPP.

Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, sangat penting dan menarik untuk dilakukan suatu penelitian dengan judul **“Efektivitas Program Bantuan Pemerintah pada Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar) Hasil Perikanan di Desa Bondalem Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut.

1.2.1 Bagaimana efektivitas program Bantuan Pemerintah pada Poklahsar ditinjau dari dimensi *Context*?

1.2.2 Bagaimana efektivitas program Bantuan Pemerintah pada Poklamsar ditinjau dari dimensi *Input*?

1.2.3 Bagaimana efektivitas program Bantuan Pemerintah pada Poklamsar ditinjau dari dimensi *Process*?

1.2.4 Bagaimana efektivitas program Bantuan Pemerintah pada Poklamsar ditinjau dari dimensi *Product*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut.

1.3.1 Efektivitas program Bantuan Pemerintah pada Poklamsar ditinjau dari dimensi *Context*.

1.3.2 Efektivitas program Bantuan Pemerintah pada Poklamsar ditinjau dari dimensi *Input*.

1.3.3 Efektivitas program Bantuan Pemerintah pada Poklamsar ditinjau dari dimensi *Process*.

1.3.4 Efektivitas program Bantuan Pemerintah pada Poklamsar ditinjau dari dimensi *Product*.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penulisan ini sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu ekonomi khususnya dalam bidang Manajemen Keuangan/Akuntansi.

1.4.2 Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memahami dan menambah ilmu pengetahuan serta wawasan khususnya di bidang ekonomi dan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana.

2) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya Program Bantuan Pemerintah dalam meningkatkan pendapatan anggota kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar) di Desa Bondalem Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng.

3) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumber pemikiran bagi pihak pemerintah dalam mengeluarkan peraturan dan kebijakan program untuk mengurangi tingkat kemiskinan pada masyarakat Pesisir, serta dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.

4) Bagi Lembaga Undiksha

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah referensi dan menjadi sumber informasi yang kompeten bagi penelitian selanjutnya.